

Analisis Kinerja Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan pada Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2019

Salsabila Azkia Farhani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email: salsabilaazkia@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, serta pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2010-2019. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis jalur (Path Analysis) dengan model data panel Fixed Effect. Pengukuran kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Penyerapan Belanja Daerah, dan Rasio Belanja Modal. Hasil penelitian ini memiliki indikasi bahwa secara simultan RDF, RPB, RBM, dan PE memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota D.I.Y. Akan tetapi, pengaruh langsung secara parsial hanya terjadi pada variabel RBM serta pengaruh tidak langsung dari variabel RPB. Kemudian, variabel RDF, RPB, dan RBM berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara parsial hanya variabel RBM yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Terakhir, Pertumbuhan Ekonomi terindikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal diterapkan pemerintah Indonesia sejak masa reformasi dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah (Kuncoro, 1997). Pemerintah daerah diberi limpahan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangan daerah nya, sehingga nantinya daerah dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Akan tetapi, praktik desentralisasi fiskal yang terjadi di Indonesia masih belum dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan secara optimal dimana salah satunya adalah ketimpangan pendapatan. Kondisi Indonesia saat ini masih termasuk dalam negara *middle-income* karena pertumbuhan ekonominya masih belum terdistribusi secara merata dan inklusif, sehingga berpotensi memberi kesengsaraan kepada masyarakat yang rentan akan kemiskinan (Ihori, 1994; Wibowo, 2016). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang memiliki otonomi khusus juga masih menghadapi tantangan ketimpangan pendapatan, bahkan menjadi daerah dengan Koefisien Gini tertinggi di tahun 2019. Dari tingkat daerah, data BPS mencatat bahwa untuk tahun tersebut daerah yang memiliki Koefisien Gini tertinggi adalah Kabupaten Bantul dan Sleman dimana keduanya berada di angka 0,42.

Pada bagian lain, pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong sangat bagus karena menempati urutan ke empat di antara Provinsi lainnya. Data BPS mencatat bahwa Laju PDRB Provinsi D.I.Y adalah sebesar 6,59% pada tahun 2019, bahkan angka tersebut relatif lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi provinsi lainnya di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta. Dengan tingginya angka laju PDRB tersebut seharusnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi D.I.Y dapat berkontribusi kepada pengurangan ketimpangan pendapatan sebagaimana

tertuai dalam studi-studi teoritis maupun empiris seperti Barro & Sala-i-Martin (2004). Studi tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpotensi menghasilkan *multiplier effects* kepada pendapatan dan konsumsi masyarakat miskin melalui penciptaan lapangan kerja, sehingga pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pendapatan dapat terwujud. Akan tetapi, kondisi yang terjadi di Provinsi D.I.Y. cenderung bertolak belakang dengan studi tersebut.

Dalam mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan, pemerintah daerah Provinsi D.I.Y. memasukkan ketimpangan pendapatan sebagai permasalahan pokok pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Peran pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan dapat dikaitkan dengan konsep *fiscal federalism* Qian & Weingast (1997) yang menjelaskan adanya pengaruh efektif dari desentralisasi terhadap ketimpangan daerah dan nasional melalui pengaturan pajak serta tidak borosnya pengeluaran publik. Konsep tersebut tampaknya juga sejalan dengan studi empiris Rakanita & Sasana (2012) yang membuktikan bahwa keseimbangan fiskal dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kondisi fiskal pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota masih cenderung kurang sehat. Hal ini dapat tercermin dari rendahnya derajat desentralisasi fiskal di antara provinsi lain di Pulau Jawa serta penggunaan anggaran belanja daerah yang bersifat tidak produktif (Artaningtyas & Sriwinarti, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, serta pengaruh pertumbuhan ekonomi kepada ketimpangan pendapatan. Pengukuran kinerja keuangan daerah dalam studi ini menggunakan indikator Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Penyerapan Belanja Daerah, dan Rasio Belanja Modal yang diadaptasi dari Halim (2004). Keterkaitan antara kinerja keuangan daerah dengan ketimpangan pendapatan ialah bahwa peneliti ingin melakukan identifikasi hasil kinerja Pemda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan pengelolaan keuangan yang baik (*value for money* dan *good governance*). Oleh karena itu, studi ini menggunakan metode analisis jalur dengan model *fixed effect* dalam membuktikan pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, serta ketimpangan pendapatan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Ketimpangan Pendapatan

Secara teoritis, Foster & Sen (1997) menjelaskan bahwa ekonomi kesejahteraan berkaitan dengan hubungan antara ekuilibrium kompetitif dan optimalitas Pareto, dimana dikatakan sebuah situasi adalah Pareto Optimal ketika tidak ada situasi lain yang dapat dicapai karena sumber daya telah dialokasikan kepada masyarakat umum secara optimum sehingga perpindahan yang akan terjadi adalah meningkatkan Pareto yang belum umum (Pareto improvement). Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan dapat terjadi karena adanya alokasi sumber daya ke masyarakat yang belum optimum, sehingga menyebabkan tidak meratanya distribusi pendapatan ke berbagai rumah tangga di negara atau daerah (Todaro & Smith, 2011)

Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, para pemikir ekonomi klasik melihat bahwa determinan dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi serta meningkatkan kapasitas produktif, sedangkan menurut paham neo-klasik faktor produksi berupa tanah, modal, dan tenaga kerja merupakan pengaruh dari pertumbuhan ekonomi (Lukasz, 2014). Sementara studi-studi kebijakan publik dan keuangan publik seperti Wagner & Weber (1977) menyebutkan bahwa pengeluaran publik bersifat endogen dalam pertumbuhan ekonomi dan merupakan sebuah konsekuensi yang alami karena proses urbanisasi, modernisasi, dan industrialisasi memerlukan pendanaan publik dalam menyediakan barang dan jasa publik. Konsep ini kemudian disebut sebagai Hukum Wagner dan sering dipakai berbagai studi lainnya dalam menemukan hubungan antara pengeluaran publik dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Hukum Wagner, meningkatnya pendapatan di suatu negara atau daerah akan diikuti oleh peningkatan pengeluaran sektor publik dan pembangunan budaya serta ekonomi. Konsep ini

sejalan dengan Barro (1990) dalam studinya dimana juga menjadikan pengeluaran publik sebagai faktor endogen dalam model pertumbuhan ekonomi endogennya.

Di sisi lain, paham Keynesian melihat kebijakan fiskal berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara jangka pendek dan bersifat eksogen (Keynes, 1936). Pengaruh ini terjadi karena adanya multiplier effect dari pengeluaran publik kepada kenaikan permintaan agregat, sehingga berpotensi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja. Efek ini kemudian akan meningkatkan pendapatan serta konsumsi rumah tangga di negara atau daerah tersebut, maka nantinya stabilitas perekonomian secara jangka pendek akan tercipta. Dalam kaitannya dengan ekonomi makro dan ketimpangan pendapatan, Barro & Sala-i-Martin (2004) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki keterlibatan penting dalam tingkat pendapatan individu. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan multiplier effects kepada pendapatan dan konsumsi masyarakat miskin karena adanya penciptaan lapangan kerja untuk mereka. Efek berikutnya yang kemudian dapat timbul adalah pengentasan kemiskinan serta mengurangi angka ketimpangan pendapatan. Namun, efek tersebut akan terjadi jika pengeluaran publik dan program/kegiatan pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat miskin (*pro-poor growth*) dilakukan secara efektif dan efisien.

Keuangan Daerah

Pemerintah melakukan intervensi pada perekonomian berupa penyediaan barang dan pelayanan publik dalam upaya untuk mengatasi kegagalan pasar, tetapi efisiensi pengadaan tersebut akan terjadi pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah karena mempunyai banyak informasi terkait keinginan dan kebutuhan masyarakat tersebut (Boadway & Shah, 2009). Selain itu, respon yang akan ditanggap dalam mengatasi permasalahan daerah akan lebih cepat jika ditangani oleh Pemerintah Daerah seperti Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, konsep fiscal federalism memiliki sudut pandang dimana derajat efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik akan meningkat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah ketika hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penerapan desentralisasi (Oates, 1972; Tiebout, 1956).

Khusaini (2018) menjelaskan bahwa terdapat tujuh prinsip penerimaan daerah yang baik dalam sebuah pengelolaan keuangan daerah, yaitu korespondensi, netralitas geografis, visibilitas, otonomi fiskal, administrasi pajak daerah, keseimbangan fiskal vertikal, dan keseimbangan fiskal horizontal. Prinsip-prinsip tersebut nantinya dapat mewujudkan Pemerintah Daerah akan keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dimana salah satu poin pentingnya adalah terkait kemampuan keuangan dan kewenangan fiskal daerah untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal. Meskipun otonomi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah seluas-luasnya, pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan tanggung jawab sebesar-besarnya. Pertanggungjawaban penggunaan APBD tertuang pada laporan realisasi anggaran maupun laporan kinerja Pemerintah Daerah dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Adanya penilaian kinerja keuangan daerah pada periode lampau berguna untuk pengambilan keputusan di masa depan, penilaian sumber-sumber ekonomi, hingga menganalisis penggunaan dana (Harjito & Martono, 2011). Oleh karena itu, program/kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila telah memenuhi aspek 3E, yaitu Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (*Value for Money*).

C. METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur dengan model panel data. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 2010 hingga 2019 serta data *cross section* yang terdiri atas 5 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan memasukkan Provinsi D.I.Y. untuk identifikasi di tingkat Pemerintah Provinsi. Data pada penelitian ini diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$P_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 R_{it} + \alpha_2 R_{it} + \alpha_3 R_{it} + \varepsilon_{it} \quad (\text{persamaan 1})$$

$$K_{it} = \beta_0 + \beta_1 R_{it} + \beta_2 R_{it} + \beta_3 R_{it} + \beta_4 P_{it} + \varepsilon_2 \quad (\text{persamaan 2})$$

Dari model tersebut dapat dilihat bahwa variabel terikat untuk persamaan 1 adalah PE (Pertumbuhan Ekonomi/Laju PDRB) dan persamaan 2 ialah KP (Ketimpangan Pendapatan/Koefisien Gini). Dalam persamaan 1 model regresi bertujuan untuk melihat pengaruh dari RDF (Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal), RPB (Rasio Penyerapan Belanja Daerah), dan RBM (Rasio Belanja Modal) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian, persamaan kedua untuk melakukan identifikasi pengaruh dari RDF, RPB, RBM, dan PE terhadap Ketimpangan Pendapatan. Pada Tabel 1 dapat dilihat penjabaran terkait definisi operasional variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

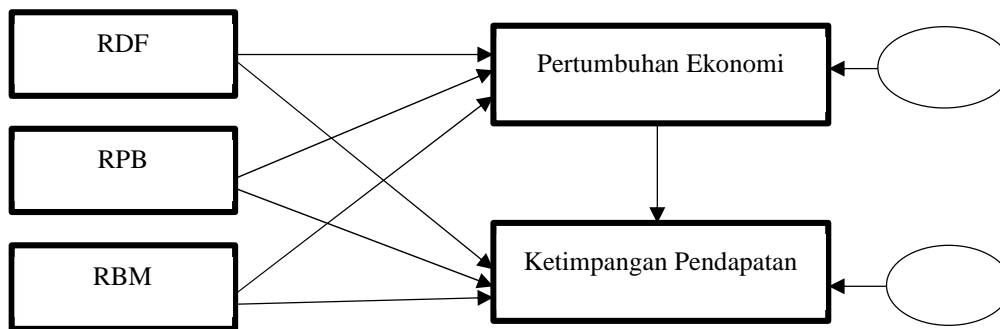
Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No	Nama Variabel	Definisi	Pengukuran
1	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X1)	Kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2015)	$\frac{(PAD)}{(TPAD)} \times 100\%$
2	Rasio Penyerapan Belanja Daerah (X2)	Tingkat penghematan anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah (Mahmudi, 2015)	$\frac{(\text{Realisasi Belanja Daerah})}{(\text{Realisasi Pendapatan Daerah})} \times 100\%$
3	Rasio Belanja Modal (X3)	Jumlah belanja modal yang dialokasikan pada belanja daerah (Mahmudi, 2015)	$\frac{(RBM)}{(TBM)} \times 100\%$
4	Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Nilai tambah bruto dari seluruh barang/jasa pada suatu wilayah untuk periode waktu tertentu	$\frac{PB_t - PB_{t-1}}{PB_{t-1}} \times 100\%$
5	Ketimpangan Pendapatan (Z)	Kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu dengan distribusi yang mewakili persentase kumulatif penduduk	$1 - \sum_{i=1}^n f_p \times (F_i + F_{i-1})$

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Path Analysis dalam penelitian ini digunakan untuk melihat besaran pengaruh langsung antara kinerja keuangan daerah terhadap ketimpangan pendapatan, maupun secara tidak langsung melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Adapun diagram jalur yang digunakan penelitian ini dalam menjelaskan hubungan antar variabel dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram Jalur



Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Pemilihan model regresi data panel dalam penelitian pertama dilakukan dengan Uji Chow untuk menentukan *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya, Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model yang terbaik antara FEM dengan *Random Effect Model* (REM). Terakhir adalah Uji Lagrange-Multiplier untuk penentuan model regresi antara REM dengan CEM. Pengujian statistik berikutnya adalah uji asumsi klasik untuk membuktikan model regresi mencapai estimator yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Dalam hal ini, uji asumsi klasik yang perlu dilakukan sebelum masuk ke tahap analisis jalur adalah Uji Normalitas dengan uji Shapiro-Wilk, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolinearitas dengan VIF dan TOL, serta Uji Autokorelasi dengan metode Durbin-Watson. Setelah model regresi dapat terbukti memenuhi asumsi klasik, maka pengujian hipotesis serentak maupun parsial dilakukan dengan Uji F dan Uji t.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikatakan sebagai tolok ukur tingkat kemampuan daerah dalam kemandirian fiskalnya karena pengukuran ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Suatu daerah otonom harus memiliki tingkat derajat desentralisasi fiskalnya minimal 20% karena daerah tersebut dapat dikatakan memiliki potensi kemampuan pembiayaannya berasal dari milik sendiri (Hanafi & Laksono, 2009). Kabupaten/Kota dengan tingkat Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal lebih dari 50,01% berarti Pemerintah Daerah tersebut memiliki kemampuan sangat baik dalam menggali potensi daerahnya, sehingga jumlah Pendapatan Asli Daerah-nya lebih besar daripada penerimaan lain seperti transfer dari Pusat. Perkembangan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kecenderungan kurangnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, hanya Pemerintah tingkat Provinsi yang memiliki rata-rata RDF tergolong “baik” dengan angka 44,81% di sepanjang tahun 2010-2019. Daerah dengan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terendah adalah Kabupaten Kulon Progo dengan rata-rata sebesar 9,82% atau tergolong “sangat kurang”. Kemudian, daerah kedua terendah ialah Kabupaten Bantul dengan rata-rata 11,90% dan posisi ketiga terendah Kabupaten Gunung Kidul dengan rata-rata RDF nya 17,31%. Sedangkan rasio DDF yang relatif lebih tinggi adalah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan masing-masing rata-rata sebesar 25,99% dan 32,37%.

Dari sisi pengelolaan belanja daerah, identifikasi dan analisis terkait kinerja belanja daerah penting dilakukan karena untuk mengevaluasi upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan prinsip *value for money* (ekonomis, efisien, efektif). Terlalu borosnya pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah perlu menjadi perhatian penting karena kebocoran pada anggaran belanja daerah cenderung lebih rawan daripada kebocoran di sisi pendapatan daerah. Daerah yang memiliki rata-rata Rasio Penyerapan Belanja Daerah tertinggi selama tahun 2010-2019 adalah Kabupaten Bantul, yakni 102,32%. Akan tetapi, angka tersebut dapat dikatakan memiliki gejala keborosan karena melebihi 100% dimana hal ini mengindikasikan bahwa total realisasi belanja daerah melebihi target yang telah dianggarkan. Realisasi belanja daerah yang melebihi target dalam APBD dapat mencerminkan kurang baiknya perencanaan anggaran pemerintah daerah, sementara penghematan adalah salah satu prinsip yang mutlak dilakukan dalam sistem penganggaran berbasis kinerja

(Mahmudi, 2015). Kendati demikian, realisasi belanja daerah yang kurang dari target anggaran juga memiliki indikasi pada masih lemahnya perencanaan anggaran karena adanya *mark-up* atau pengelembungan belanja. Selain itu, hal ini juga dapat berindikasi pada tidak dijalankannya program/kegiatan yang terdapat dalam dokumen rencana kerja. Rata-rata Rasio Penyerapan Belanja Daerah yang berada di bawah 100% dan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul dengan angka 96,03%, serta pemerintah tingkat provinsi sebesar 93,79%.

Pengukuran kinerja dengan indikator Rasio Belanja Modal dilakukan untuk evaluasi dari porsi belanja daerah untuk investasi dalam bentuk belanja modal. Pengeluaran belanja modal dilakukan oleh Pemda tidak bersifat rutin, tetapi manfaat yang dihasilkan kepada masyarakat ialah manfaat langsung untuk jangka menengah maupun panjang. Akan tetapi, daerah dengan rasio kemandirian daerah yang tinggi terindikasi pada alokasi proporsi belanja modal untuk pelayanan publik yang semakin kecil (Nurhidayati & Yaya, 2013). Hasil penghitungan penelitian ini tampaknya sejalan dengan studi tersebut dimana Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat kemampuan keuangan rendah justru menempati peringkat pertama pada Rasio Belanja Modal, yakni rata-rata sebesar 16,75%. Artinya ialah bahwa pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki orientasi untuk meningkatkan investasi dalam bentuk modal agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Sementara daerah dengan rata-rata Rasio Belanja Modal terendah adalah Kabupaten Sleman, yakni sebesar 13,29%, dan cenderung memiliki kemampuan fiskal daerah relatif lebih baik daripada Kabupaten Gunung Kidul yang memperoleh rata-rata RBM sebesar 14,79%.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Penentuan model regresi data panel yang terbaik dilakukan dengan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange-Multiplier. Pada Tabel 2 dapat dilihat hasil dari pengujian statistik tersebut dimana kesimpulan yang dapat ditarik adalah model regresi data panel terbaik adalah dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Uji pertama yang dilakukan adalah Uji Chow untuk menentukan CEM atau FEM, maka dari hasil $\text{Prob} > F$ Uji Chow untuk persamaan pertama dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat adalah sebesar 0,0319. Hasil $\text{Prob} > F$ tersebut tampaknya relatif lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$, sehingga model terbaik untuk persamaan pertama adalah FEM. Kemudian, hasil sama juga terjadi pada persamaan kedua dengan $\text{Prob} > F$ (0,0383) relatif lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$ yang berindikasi model terbaik adalah FEM.

Tabel 2. Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Model	Uji Chow ($\text{Prob} > F$)	Uji Hausman ($\text{Prob} > \text{Chi}^2$)	Kesimpulan
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	0,0319	0,0003	FEM
Ketimpangan Pendapatan (KP)	0,0383	0,0000	FEM

Sumber: Hasil Statistik (2021), diolah

Dari hasil Uji Hausman memperoleh nilai $\text{Prob} > \text{Chi}^2$ sebesar 0,0003 untuk persamaan pertama dan 0,0000 untuk persamaan kedua. Hipotesisnya adalah bahwa model terbaik adalah REM, jika $\text{Prob} > \text{Chi}^2$ lebih dari 0,05 (H_0). Dengan nilai $\text{Prob} > \text{Chi}^2$ untuk persamaan pertama sebesar 0,0003 dapat dikatakan bahwa model data panel terbaik yang digunakan adalah FEM. Hal ini juga berlaku kepada persamaan kedua yang memiliki nilai $\text{Prob} > \text{Chi}^2$ sebesar 0,0000 relatif lebih rendah daripada 0,05 sehingga model terbaik adalah FEM. Kesimpulannya adalah kedua persamaan tampaknya lebih cocok menggunakan *Fixed Effect Model* sebagai model estimasi regresi data panel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis serta analisis jalur, sehingga nantinya model regresi yang digunakan dapat dipastikan memiliki penduga yang baik dan hasil analisis menjadi tidak bias. Pada Tabel 2 telah dipaparkan hasil uji asumsi klasik untuk kedua persamaan. Hasil uji normalitas dengan Uji Shapiro-Wilk membuktikan baik persamaan pertama maupun kedua memiliki distribusi normal dan telah memenuhi asumsi normalitas. Hal ini dapat

dilihat dari nilai Prob (0,0517) lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05 untuk persamaan pertama, serta Prob (0,9516) lebih besar daripada 0,05. Kemudian, uji heteroskedastisitas menghasilkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada persamaan pertama maupun kedua dengan nilai Prob masing-masing sebesar 0,1373 dan 0,0724. Dengan ini, gejala heteroskedastisitas tidak terdeteksi pada kedua persamaan dan telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Model	Uji Normalitas	Uji Heteroskedastisitas	Uji Multikolinearitas	Uji Autokorelasi
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Distribusi Normal (Prob>0,05)	Tidak ada gejala heteroskedastisitas (Prob>0,05)	Tidak ada multikolinearitas (VIF < 10)	Terdapat gejala autokorelasi positif
Ketimpangan Pendapatan (KP)	Distribusi Normal (Prob>0,05)	Tidak ada gejala heteroskedastisitas (Prob>0,05)	Tidak ada multikolinearitas (VIF < 10)	Tidak ada gejala autokorelasi

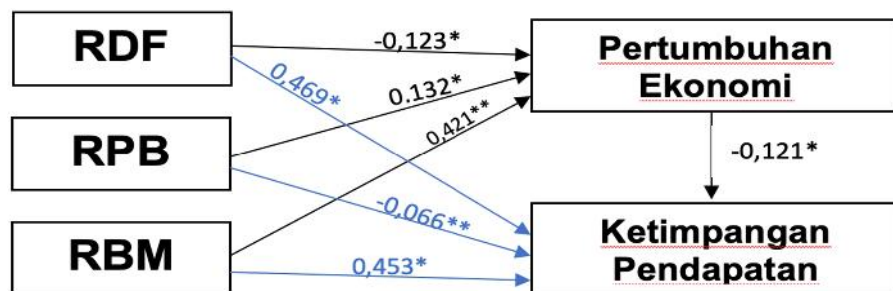
Sumber: Hasil Statistik (2021), diolah

Pengujian selanjutnya adalah mendeteksi gejala multikolinearitas dengan nilai VIF untuk setiap variabel pada kedua persamaan. Hasil uji tersebut membuktikan bahwa ketiga variabel dalam persamaan pertama tidak memiliki gejala multikolinearitas karena ketiga nilai VIF relatif lebih rendah dari 10. Tidak adanya gejala multikolinearitas juga terjadi pada persamaan kedua karena nilai VIF untuk empat variabel relatif lebih rendah dari 10. Uji asumsi klasik terakhir adalah Uji Autokorelasi dimana tampaknya pada persamaan pertama terdapat gejala autokorelasi positif karena $0 < d < dL$ ($0 < 1,374347 < 1,480$). Akan tetapi, model FEM dapat diasumsikan bahwa semua Kabupaten/Kota (*cross-section*) tidak memiliki autokorelasi dari waktu ke waktu dan pemenuhan asumsi autokorelasi dapat terpenuhi (Gujarati, 2003).

Hasil Analisis Jalur

Pada Gambar 2 telah dipaparkan hasil analisis jalur yang dapat memberi sebuah deskripsi dari pengaruh langsung maupun tidak langsung variable independen terhadap variabel dependen. Besaran pengaruh langsung antar variabel diperoleh dari koefisien beta atau koefisien regresi yang distandarisasi. Sementara besaran untuk pengaruh tidak langsung diperoleh dari mengalikan nilai koefisien pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen. Dalam hal ini, variabel endogen pada penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan. Sedangkan variabel eksogen nya adalah variabel Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Penyerapan Belanja Daerah, dan Rasio Belanja Modal sebagai indikator Kinerja Keuangan Daerah.

Gambar 2. Analisis Jalur



Keterangan:

* = Pengaruh Tidak Signifikan

** = Pengaruh Signifikan

Sumber: Hasil Statistik (2021), diolah

Berdasarkan pada Gambar 2 dapat diketahui pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total yang diuraikan pada Tabel 3. Variabel dengan pengaruh langsung terbesar

terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Rasio Belanja Modal dengan koefisien beta sebesar 0,421, sedangkan yang terkecil adalah Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar -0,123. Dari diagram analisis jalur diperoleh bahwa hanya variabel Rasio Belanja Modal saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sementara variabel independen yang memiliki pengaruh tidak langsung terbesar kepada Ketimpangan Pendapatan adalah Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Akan tetapi, hasil analisis jalur menunjukkan hanya variabel Rasio Penyerapan Belanja Daerah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan (melalui Pertumbuhan Ekonomi).

Tabel 4. Rangkuman Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total Model Persamaan 1 dan 2

Variabel	Pengaruh		
	Langsung	Tidak Langsung	Total
RDF -> PE	-0,123		
RPB -> PE	0,132		
RBM -> PE	0,421		
PE -> KP	-0,121		
RDF -> KP	0,469	0,015	0,484
RPB -> KP	-0,066	-0,016	-0,082
RBM -> KP	0,453	-0,051	0,402

Sumber: Hasil Statistik (2021), diolah

Pembahasan

Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian hipotesis parsial untuk model persamaan pertama menghasilkan nilai signifikansi dari variabel RDF sebesar 0,720, maka artinya hipotesis nol diterima atau dapat dikatakan bahwa RDF memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan studi Astuti et al. (2018) yang juga membuktikan tidak adanya pengaruh signifikan dari derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi secara jangka pendek maupun jangka panjang di Kabupaten Wonosobo. Kondisi yang terjadi ini dapat berimplikasi bahwa Pemerintah Daerah tampaknya belum dapat menciptakan kekuatan pendapatan lokal nya secara optimal, sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta masih lebih rendah daripada pos pendapatan daerah lainnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah menghadapi beberapa tantangan dan hambatan dalam menggali potensi PAD nya seperti tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari Pusat serta adanya sistem *closed-list* pada pemungutan pajak daerah (Ananda, 2017). Data DJPK Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di D.I.Y. masih belum dapat menggali potensi PAD nya secara optimal karena masih tingginya proporsi Dana Perimbangan pada pos pendapatan daerah. Sebagai misalnya adalah Kabupaten Kulon Progo dengan rata-rata PAD sebesar Rp148 miliar dan rata-rata Dana Perimbangan sebesar Rp765 miliar. Selisih yang cukup besar antara proporsi Dana Perimbangan dengan PAD tersebut mencerminkan bahwa Kabupaten Kulon Progo belum mampu melaksanakan otonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Pengaruh Rasio Penyerapan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian hipotesis parsial untuk model persamaan pertama menghasilkan nilai signifikansi dari variabel RPB sebesar 0,369, maka artinya hipotesis nol diterima atau dapat dikatakan bahwa RPB memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi yang terjadi di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada penelitian ini tampaknya sejalan dengan studi Taher & Tuasela (2019) yang membuktikan tidak adanya pengaruh signifikan dari penyerapan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika. Kondisi tidak signifikan tersebut dapat terjadi karena perencanaan, alokasi anggaran, dan penggunaan anggaran belanja daerah masih belum mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi

daerah. Di sisi lain, konsep ekonomi seperti paham Keynesian menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memberi stimulus kepada pertumbuhan ekonomi meskipun dengan asumsi penggunaannya untuk kegiatan yang lebih produktif. Dengan ini, realisasi belanja daerah yang dilakukan untuk tujuan konsumtif tampaknya perlu dikurangi dan dapat dialihkan kepada belanja produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara keseluruhan, kondisi pengelolaan belanja daerah untuk semua Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung hemat. Hampir semua daerah memiliki keseimbangan dari rata-rata realisasi dan anggaran belanja daerah. Salah satu daerah yang memiliki keseimbangan yang hampir sempurna adalah Kabupaten Bantul dengan rata-rata realisasi belanja daerah sebesar Rp1.706 miliar dan rata-rata anggaran belanja daerah Rp1.700 miliar atau 99,68%. Akan tetapi, rata-rata Rasio Penyerapan Belanja Daerah tahun 2010-2019 untuk Kabupaten Bantul tampak berada di peringkat terakhir karena angka tersebut relatif lebih besar di antara daerah lain. Hal ini kemungkinan dapat terjadi karena Kabupaten Bantul di tahun 2010-2013 memiliki Rasio Penyerapan Belanja Daerah yang tinggi karena realisasi pengeluarannya telah melebihi jumlah yang telah dianggarkan. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, penyerapan belanja daerah yang sesuai target dalam APBD menjadi suatu hal yang penting karena terpakainya sumber dana dengan manfaat maksimal. Hal ini dapat dijelaskan Sinaga (2016) bahwa kondisi dana menganggur tersebut salah satunya terjadi karena perencanaan anggaran yang lemah, sehingga Pemerintah Daerah menghadapi kesulitan untuk mengarahkan penggunaan anggarannya dengan tepat sasaran.

Pengaruh Rasio Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian hipotesis parsial untuk model persamaan pertama menghasilkan nilai signifikansi dari variabel RBM sebesar 0,002, maka artinya hipotesis nol ditolak atau dapat dikatakan bahwa RBM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, akumulasi kapital memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan dalam hal ini pengeluaran pemerintah untuk belanja modal diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan (Todaro & Smith, 2011). Hasil penelitian ini sejalan dengan studi-studi empiris seperti Waryanto (2017) dan Suwandi & Tahar (2015) yang membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan dari Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Belanja Modal memberi multiplier effect kepada pertumbuhan ekonomi karena investasi Pemerintah yang bersifat produktif. Efek tersebut dapat tercapai oleh suatu daerah secara terus menerus apabila Pemerintah Daerah nya melakukan perbaikan infrastruktur serta sarana dan prasarana daerah. Belanja modal yang digunakan untuk pelayanan publik nantinya akan menambahkan sarana dan prasarana publik, sehingga hasil dari alokasi tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat (Nurhidayati & Yaya, 2013).

Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah otonomi khusus tampaknya masih belum melakukan pengelolaan belanja modalnya secara optimal, terutama untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Kontribusi tertinggi dari belanja modal terhadap total belanja daerah untuk tahun anggaran 2011-2019 ialah dari Pemerintah Provinsi D.I.Y dengan rata-rata sebesar Rp650 miliar atau 44% dari rata-rata belanja langsung. Akan tetapi, perbandingan antara rata-rata realisasi belanja modal dengan belanja barang dan jasa masih cukup besar yakni di angka Rp140 miliar. Dari tingkat Pemda, Kabupaten Sleman menempati urutan kedua pada rata-rata realisasi belanja modal dengan angka sebesar Rp303 miliar atau 38% dari rata-rata belanja langsung. Sementara, daerah dengan rata-rata realisasi belanja modal terendah adalah Kota Yogyakarta sebesar Rp218 miliar.

Pengaruh RDF, RPB, dan RBM secara Simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan uji simultan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Penyerapan Belanja Daerah, serta Rasio Belanja Modal secara serentak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil Uji F membuktikan pengaruh serentak tersebut dengan nilai signifikansi sebesar 0,017, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima karena ketiga variabel independen berpengaruh langsung dan signifikan secara serentak terhadap variabel dependen. Hal ini sejalan dengan studi Rachman & Aryanti (2020) yang membuktikan bahwa kinerja keuangan dengan salah satu proksinya Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Alokasi Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara serentak. Studi ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk tahun anggaran 2008-2017.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Pengujian hipotesis parsial dari variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,299. Jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan secara langsung. Dengan ini dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua (H2) “Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota D.I.Y.” tidak dapat diterima. Hasil ini sejalan dengan studi Niyimbanira (2017) yang membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Mpumalanga, Afrika Selatan pada tahun 1996-2014. Beberapa kajian menjelaskan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan menjadi sebuah prasyarat terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, upaya mengatasi ketimpangan pendapatan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Permasalahan tersebut tampaknya membutuhkan suatu model pembangunan sosial-ekonomi yang kuat agar dapat mengatasi masalah ketidakesetaraan. Peningkatan kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin perlu diatasi karena permasalahan ini berdampak negatif kepada semua esensi kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, hingga mobilitas sosial. Dengan ini, permasalahan ini dapat diatasi dengan memperluas kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan paling tidaknya kebutuhan hidup dasar yang layak.

Pengaruh RDF, RPB, RBM, dan PE Secara Simultan terhadap Ketimpangan Pendapatan

Selanjutnya adalah pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau serentak. Pengujian hipotesis simultan menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,0000. Jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa variabel RDF, RPB, RBM, dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan secara serentak. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi terbukti lebih kecil daripada (Sig. $F < \alpha$). Dengan ini, hipotesis ketiga (H3) “Variabel RDF, RPB, RBM, dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan secara simultan di Kabupaten/Kota D.I.Y.” dapat diterima. Hipotesis ketiga dalam studi ini dapat diterima dimana artinya Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Penyerapan Belanja Daerah, Rasio Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan secara serentak. Adanya pengaruh signifikan tersebut dapat dijelaskan bahwa pengurangan ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terwujud dengan meningkatnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah serta Pertumbuhan Ekonomi secara bersamaan. Kondisi tersebut baru terjadi apabila keseluruhan variabel tersebut mengalami peningkatan, maka dari itu pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip *value for money* dan anggaran berbasis kinerja perlu dilakukan secara tegas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan

Pengujian hipotesis parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Rasio DDF terhadap Ketimpangan Pendapatan atau Koefisien Gini. Hasil uji t tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi relatif lebih besar daripada $\alpha = 0,05$, maka dapat dikatakan Rasio DDF memiliki pengaruh langsung yang tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan (Sig. $> \alpha$). Identifikasi hipotesis ke empat (H4) “Variabel RDF secara tidak langsung memberi pengaruh negatif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota D.I.Y” dapat diperoleh dari hasil koefisien jalur yang telah dilakukan sebelumnya. Pengaruh tidak langsung RDF terhadap Ketimpangan Pendapatan sebesar 0,015. Sementara, pengaruh langsung dari RDF terhadap Ketimpangan Pendapatan adalah sebesar 0,469. Oleh karena itu, variabel RDF tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap Ketimpangan Pendapatan. Hal ini dikarenakan nilai pengaruh tidak langsung relatif lebih kecil daripada pengaruh langsung. Hipotesis ke empat dapat dikatakan tidak bisa diterima karena variabel RDF tidak menunjukkan pengaruh tidak langsung yang signifikan.

Fakta yang terjadi di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasar dari studi ini tampaknya bertolak belakang dengan berbagai literatur *fiscal federalism* yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat memberi efek pada efisiensi redistribusi pendapatan (Goerl & Seiferling, 2014). Sementara, kondisi desentralisasi fiskal yang telah dijelaskan dalam studi ini cenderung tidak sejalan dengan pernyataan tersebut. Hal ini kemudian dapat dijelaskan dari pendapat Siburian (2020) yang menyatakan bahwa perbedaan dan disparitas kondisi awal pembangunan ekonomi antar daerah dapat mempengaruhi dampak dari pengeluaran daerah untuk mengatasi ketimpangan pendapatan.

Kemudian, studi tersebut juga menjelaskan bahwa pendapatan daerah dan penyediaan barang publik lokal ditentukan secara bersamaan. Oleh karena itu, peran Pemerintah Pusat dalam mendistribusikan sumber daya secara lebih merata antar daerah diyakini dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Pengaruh Rasio Penyerapan Belanja Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan

Pengujian hipotesis parsial Rasio Penyerapan Belanja Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,591. Jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa Rasio Penyerapan Belanja Daerah memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan secara langsung. Selanjutnya, identifikasi pengaruh tidak langsung dapat ditelusuri melalui analisis jalur. Hasilnya menunjukkan bahwa koefisien jalur untuk pengaruh tidak langsung RPB terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar -0,016. Sementara, pengaruh langsung dari RPB terhadap Ketimpangan Pendapatan adalah -0,066. Koefisien jalur pengaruh tidak langsung tampaknya bernilai lebih besar daripada pengaruh langsungnya ($-0,016 > -0,066$). Hasil ini menunjukkan bahwa RPB memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi. Oleh karena itu, hipotesis ke lima (H5) “Variabel RPB secara tidak langsung memberi pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota D.I.Y.” dapat diterima.

Studi World Bank & Badan Kebijakan Fiskal (2020) juga membuktikan bahwa reformasi kebijakan fiskal atas belanja yang lebih lebih (*better spending*) telah menghasilkan beberapa hasil positif kepada ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penghematan belanja daerah yang tidak tepat sasaran dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan adil di masa depan, sehingga permasalahan ketimpangan pendapatan dapat teratasi. Meskipun terdapat pengaruh tidak langsung secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, Pemerintah Kabupaten/Kota D.I.Y tampaknya masih menghadapi beragam permasalahan pengelolaan belanja daerah. Pada dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi D.I.Y. tercantum empat poin permasalahan utama belanja daerah yang terjadi di tingkat provinsi untuk periode 2019. **Pertama**, pengadaan barang/jasa yang tidak selesai dilaksanakan secara tepat waktu. Permasalahan ini tampaknya berkaitan dengan keterlambatan proses lelang barang/jasa. **Kedua**, terjadi pemutusan kontrak kepada penyedia barang/jasa yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya barang/jasa sesuai dengan perjanjian kontrak. **Ketiga**, adanya kelebihan volume pekerjaan konstruksi dari hasil pemeriksaan internal pemerintah maupun eksternal. **Terakhir**, adanya kegiatan yang telah dilakukan tetapi telah dilakukan efisiensi pada perubahan APBD. Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten/Kota memerlukan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang lebih optimal dan baik.

Pada bagian lain, permasalahan kebutuhan hidup dasar yang kerap dihadapi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah terkait ketimpangan infrastruktur layanan publik, ketimpangan fiskal antar daerah, serta ketimpangan SDM Angga et al. (2017). Studi IRE tersebut menemukan bahwa adanya pemusatan atau konsentrasi penyediaan fasilitas serta layanan publik terutama untuk kebutuhan dasar di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memberi faktor terjadinya ketimpangan di daerah D.I.Y lainnya. Tidak meratanya fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas dapat menjadi penghambat bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, dalam mendapatkan akses kebutuhan hidup dasarnya. Dengan kondisi tersebut, perlu adanya peningkatan efektivitas kebijakan/program, hingga pengelolaan anggaran yang memiliki orientasi pada pemerataan akses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Pengaruh Rasio Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan

Pengujian hipotesis parsial dari Rasio Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan menghasilkan nilai signifikan uji t sebesar 0,000. Dengan α sebesar 0,05 dapat dibuktikan bahwa Rasio Belanja Modal memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Koefisien jalur dari pengaruh langsung RBM terhadap Ketimpangan Pendapatan ini ialah sebesar 0,453. Sementara, pengaruh tidak langsung dari RBM terhadap Ketimpangan Pendapatan diperoleh dari $0,421 \times -0,121 = -0,051$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel RBM tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap Ketimpangan Pendapatan. Hal ini dikarenakan nilai koefisien jalur pengaruh tidak langsung lebih kecil daripada koefisien jalur pengaruh langsung. Oleh karena itu, hipotesis ke enam (H6) “Variabel RBM secara tidak langsung memberi pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota D.I.Y.” tidak dapat diterima.

Hasil tersebut sejalan dengan studi Anshari et al. (2018) yang membuktikan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan untuk seluruh Provinsi di Indonesia. Pengaruh positif tersebut berarti bahwa apabila belanja modal mengalami peningkatan, maka ketimpangan pendapatan akan meningkat juga. Hal ini kemungkinan dapat terjadi karena tidak meratanya alokasi belanja modal. Pemerataan alokasi belanja modal yang hanya terpusat pada beberapa daerah saja berpotensi menghasilkan tidak tercapainya pemerataan pembangunan untuk semua daerah di Indonesia. Daerah dengan alokasi belanja modal yang relatif lebih rendah daripada daerah lain akan mengurangi potensi terciptanya investasi serta lapangan pekerjaan baru. Akibatnya ialah ketimpangan pendapatan antar-daerah menjadi semakin meningkat seiring dengan ketersediaan lapangan kerja dan upah minimum provinsi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perbandingan realisasi Belanja Modal antara Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Provinsi tampaknya berbeda cukup tinggi. Pada Gambar 4.12 dapat dilihat bahwa Provinsi D.I.Y. di sepanjang tahun 2015-2019 berada di peringkat pertama dalam pengeluaran Belanja Modal dengan rata-rata sebesar Rp.935.847.390.219, sementara yang terendah adalah Kota Yogyakarta dengan rata-rata sebesar Rp.292.565.139.217. Daerah Kabupaten seperti Kulon Progo dan Bantul yang memiliki corak kemiskinan memiliki aset produktif terbatas serta bekerja sebagai buruh di sektor pertanian dan informal berada di posisi ke 4 dan 5 dari segi realisasi belanja modal. Berdasarkan data DJPK Kementerian Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kulon Progo cenderung melakukan belanja daerahnya untuk belanja tidak langsung. Sementara, realisasi Belanja Modal di sepanjang tahun 2016-2019 masih cenderung rendah.

Kondisi tersebut tampaknya sejalan dengan hasil studi ini yang membuktikan bahwa Rasio Belanja Modal memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat dijelaskan juga dari studi Yasni & Yulianto (2020) yang menemukan hasil cenderung sama, yaitu adanya pengaruh positif secara signifikan dari belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota seluruh provinsi di Indonesia. Studi tersebut memaparkan bahwa alokasi belanja modal yang memiliki sifat jangka panjang cenderung hanya diserap pengusaha besar dengan keahlian serta modal tinggi. Selain itu, aktivitas ekonomi dengan beragam pilihan dapat tercipta dari belanja modal dan selanjutnya membentuk kehidupan *urban-like*. Oleh karenanya, kesenjangan pendapatan yang terjadi pada antar-daerah dapat menjadi semakin tinggi seiring dengan peningkatan belanja modal.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Studi empiris ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung dari kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari pengujian hipotesis dan analisis jalur, maka diperoleh kesimpulan studi sebagai berikut:

1. Variabel Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Penyerapan Belanja Daerah, dan Rasio Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan secara serentak terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi, pengaruh tidak langsung kepada Ketimpangan Pendapatan secara parsial tampaknya hanya terjadi pada variabel Rasio Penyerapan Belanja Daerah. Sementara, pengaruh langsung terhadap Ketimpangan Pendapatan hanya untuk variabel Rasio Belanja Modal.
2. Variabel Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Penyerapan Belanja Daerah, dan Rasio Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan secara serentak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi, variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara parsial hanyalah Rasio Belanja Modal.
3. Variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi masih belum dapat berpotensi mengurangi permasalahan ketimpangan pendapatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka Penulis mengusulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat memperhatikan kembali akan kinerja keuangan daerahnya, terutama pada kemampuan fiskal daerah dan pengelolaan belanja daerah. Upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, seperti memperluas basis penerimaan hingga membuat perencanaan yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas penerimaan, tampaknya perlu lebih ditingkatkan untuk mencapai kemampuan daerah yang baik. Selain itu, realisasi belanja daerah sesuai dengan target dalam APBD untuk program/kegiatan yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan pendapatan tampaknya perlu ditingkatkan kembali.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat merencanakan dan melakukan realisasi belanja modal yang lebih ditingkatkan agar penggunaan sumber dana dapat dimanfaatkan untuk belanja produktif dan memberi dampak langsung kepada masyarakat, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud melalui multiplier effect dari belanja modal.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memperhatikan kembali kondisi permasalahan ketimpangan pendapatan di Yogyakarta. Kebijakan yang memberi upaya redistribusi untuk jangka panjang dan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan harus diprioritaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, C. F. (2017). *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika Dan Strategi Pembangunan*. UB Press.
- Angga, R. D., Mariana, D., Harjono, Rindandari, H., Lestari, K. D., Jayanti, M., Ahmad, M., Fitrianingrum, N., Suyanto, & Hapsari, Z. D. (2017). Ketimpangan Perdesaan Dan Perkotaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. In *IRE Yogyakarta*. [Http://Www.Ireyogya.Org/Ketimpangan-Perdesaan-Dan-Perkotaan-Di-Daerah-Istimewa-Yogyakarta/](http://www.ireyogya.org/ketimpangan-perdesaan-dan-perkotaan-di-daerah-istimewa-yogyakarta/)
- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni. (2018). Analisis Pengaruh Pendidikan , Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *Ecogen*, 1(3), 494–502.
- Artaningtyas, W. D., & Sriwinarti, A. (2020). The Influence Of Fiscal Decentralization, Economic Growth, And Economic Openness On The Inter-Provincial Development Disparity On Java 2001-2017. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 15(2), 100–115. [Http://Jp.Feb.Unsoed.Ac.Id/Index.Php/Eko-Regional/Article/View/1380](http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/eko-regional/article/view/1380)
- Astuti, A. B., Juliprijanto, W., & Septiani, Y. (2018). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal , Derajat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Wonosobo Periode Physic Decentralized Impact , Degrees Fiscal Autonomy , And Total Management Of The Region Growth Economics In Wonosobo Period 2001- Bertujuan Untuk Memperc. *DINAMIC : Directory Journal Of Economic*, 2(1).
- Barro, R. J. (1990). Government Spending In A Simple Model Of Endogeneous Growth. *Journal Of Political Economy*, 98(5), 103–125. [Https://Doi.Org/10.1086/261726](https://doi.org/10.1086/261726)
- Barro, R. J., & Sala-I-Martin, X. (2004). *Economic Growth* (2nd Ed., Vol. 43, Issue 2). The MIT Press. [Https://Doi.Org/10.1057/9781137022974_1](https://doi.org/10.1057/9781137022974_1)
- Boadway, R., & Shah, A. (2009). *Fiscal Federalism: Principles And Practice Of Multiorder Governance*. Cambridge University Press. [Https://Doi.Org/DOI: 10.1017/CBO9780511626883](https://doi.org/10.1017/CBO9780511626883)
- Foster, J., & Sen, A. (1997). On Economic Inequality. In *Journal Of Chemical Information And Modeling* (Vol. 53, Issue 9). Oxford University Press.
- Goerl, C.-A., & Seiferling, M. (2014). Income Inequality, Fiscal Decentralization And Transfer Dependency. *IMF Working Papers*, 14(64), 1. [Https://Doi.Org/10.5089/9781484354711.001](https://doi.org/10.5089/9781484354711.001)
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics* (Fourth Edi). Mcgraw-Hill/Irwin.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hanafi, I. N., & Laksono, T. (2009). *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. UB Press.
- Harjito, A., & Martono. (2011). *Manajemen Keuangan* (Kedua). Penerbit EKONISIA.
- Ihori, T. (1994). Immiserizing Growth With Interregional Externalities Of Public Goods. *Regional Science & Urban Economics*, 24, 485–496.
- Keynes, J. M. (1936). The General Theory Of Employment, Interest And Money. *Journal Of The American Statistical Association*, 31(196), 791. [Https://Doi.Org/10.2307/2278703](https://doi.org/10.2307/2278703)
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. UB Press.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Dan Kebijakan*. Unit Penerbit Dan Percetakan PN.
- Lukasz, P. (2014). Review Of Theories And Models Of Economic Growth Comparative. *Comparative Economic Research*, 17(1), 45–60. [Https://Doi.Org/10.2478/Cer-2014-0003](https://doi.org/10.2478/Cer-2014-0003)

- Mahmudi. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*. UPP STIM YKPN.
- Niyimbanira, F. (2017). Analysis Of The Impact Of Economic Growth On Income Inequality And Poverty In South Africa: The Case Of Mpumalanga Province. *International Journal Of Economics And Financial Issues*, 7(4), 254–261. [Http://www.Econjournals.Com](http://www.econjournals.com)
- Nurhidayati, L. L., & Yaya, R. (2013). Alokasi Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik : *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 17(2), 102–114. [Https://Doi.Org/10.20885/Jaai.Vol17.Iss2.Art2](https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss2.art2)
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Qian, Y., & Weingast, B. R. (1997). Federalism As A Commitment To Preserving Market Incentives. *Journal Of Economic Perspectives*, 11(4), 83–92. [Https://Doi.Org/10.1257/Jep.11.4.83](https://doi.org/10.1257/jep.11.4.83)
- Rachman, D., & Aryanti, M. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Dan Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(2011), 41–54.
- Rakanita, A. M., & Sasana, H. (2012). Kajian Desentralisasi Fiskal Terhadap Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi. *JEJAK : Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 5(1).
- Sibirian, M. E. (2020). Fiscal Decentralization, Regional Income Inequality, And The Provision Of Local Public Goods: Evidence From Indonesia. In *WINPEC Working Paper Series No.E2001* (Issue 05). [Https://Ideas.Repec.Org/P/Wap/Wpaper/2001.Html](https://ideas.repec.org/p/wap/wpaper/2001.html)
- Sinaga, E. J. (2016). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) Dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 261–274. [Https://Rechtsvinding.Bphn.Go.Id/Artikel/ART_8_JRV_5.2_WATERMARK.Pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/art_8_jrv_5.2_watermark.pdf)
- Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *Jurnal Infestasi*, 11(2), 118–136.
- Taher, S., & Tuasela, A. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritas*, 3(2).
- Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory Of Local Expenditures. *The Journal Of Political Economy*, 64(5), 416–424. [Https://Www.Jstor.Org/Stable/1826343%0A](https://www.jstor.org/stable/1826343)
- Todoaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi, Edisi 9, Jilid 1*. Erlangga. [Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=M8kmk_Kbsx4c](https://books.google.co.id/books?id=M8kmk_Kbsx4c)
- Wagner, R. E., & Weber, W. E. (1977). WAGNER'S LAW, FISCAL INSTITUTIONS, AND THE GROWTH OF GOVERNMENT. *National Tax Journal*, 30(1). [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1086/NTJ41862113](https://doi.org/10.1086/NTJ41862113)
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35–55. [Https://Doi.Org/10.33105/Itrev.V2i1.13](https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13)
- Wibowo, T. (2016). Ketimpangan Pendapatan Dan Middle Income Trap. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 20(2).
- World Bank, & Badan Kebijakan Fiskal. (2020). *Revisiting The Impact Of Governments Spending And Taxes On Poverty And Inequality In Indo*.
- Yasni, R., & Yulianto, H. (2020). Peran Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 4(1), 39–63.